

PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS DANA DESA

Putu Ayu Desy Ratna Dewi¹, I Putu Julianto²

¹²Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia
e-mail: ayudesyratna01@gmail.com, putujulianto@undiksha.ac.id

Abstrak

Dana desa merupakan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara langsung kepada Pemerintah desa. Penerimaan dana desa yang begitu besar memiliki resiko yang besar pula, oleh karena itu dana desa yang diterima harus dipertanggungjawabkan dengan baik, maka Pemerintah desa dituntut untuk memiliki akuntabilitas yang baik oleh Pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem informasi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dan pengaruh sistem pengendalian internal Pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil kuesioner. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh sekretaris dan bendahara pemerintahan desa se- Kabupaten Buleleng yang berjumlah 258 orang. Berdasarkan hasil perhitungan sampel dengan metode Slovin, maka dari 56 desa di Kabupaten Buleleng jumlah responden ditentukan sebanyak 112 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner secara online menggunakan google form. Metode analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS version 24 for Windows.

Kata kunci: Siskeudes, Pengendalian Internal, Akuntabilitas

Abstract

Village funds are allocations of the State Revenue and Expenditure Budget directly to the village government. Receiving village funds that are so large has a big risk too, therefore village funds that are received must be accounted for properly, so the village government is required to have good accountability by the central government. This study aims to determine the effect of the village financial information system on the accountability of village fund management and the influence of the Government's internal control system on the accountability of village fund management. The method used in this research is quantitative by using primary data obtained from the questionnaire. The population in this study were all secretaries and treasurers of village government in Buleleng Regency, amounting to 258 people. Based on the results of sample calculations using the Slovin method, from 56 villages in Buleleng Regency, the number of respondents was determined as many as 112 respondents. The data collection technique is done by distributing questionnaires online using google form. Methods of data analysis using multiple linear regression with the help of the SPSS version 24 for Windows program. The results of this study indicate that the application of financial information systems has a positive and significant effect on the accountability of village funds with a significance value of $0.000 < 0.050$. Then internal control has a positive and significant effect on the accountability of village funds with a significance value of $0.000 < 0.050$.

Keywords : Siskeudes, Internal Control, Accountability

1. Pendahuluan

Desa bisa diartikan sebagai pemerintahan terbawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dinilai tonggak baru bagi Pemerintah desa guna mewujudkan pembangunan bottom-up serta memberikan kewenangan yang lebih luas dari sebelumnya. Dengan adanya Undang-Undang tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah pusat guna mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilakukan secara langsung kepada Pemerintah desa yang selanjutnya hal ini dinamakan dana desa. Menyalurkan pengiriman lewat perantara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan difungsikan guna menopang pembiayaan dalam menyelenggarakan pemerintahan, melakukan pembangunan, melakukan pembinaan masyarakat, dan melakukan pemberdayaan masyarakat (PP No 8 Th 2016).

Oleh kondisi ini, maka penerimaan dana desa wajib memperoleh pertanggungjawaban secara baik. Dalam hal ini maka timbul penuntutan pada Pemerintah desa agar menunjukkan secara nyata akuntabilitasnya yang secara baik kepada Pemerintah pusat. Akuntabilitas dimaknai adanya kewajiban dalam memperoleh pertanggung-jawaban atau memberikan respon secara nyata dan mendefinisikan kualitas kinerja serta perbuatan seseorang atau pemangku suatu unit entitas atau organisasi kepada pihak yang telah mempunyai wewenang atau yang berwenang memohon pertanggungjawaban. Apabila ada dorongan yang bersifat secara baik pada akuntabilitas, maka suatu sistem akuntansi mampu memberikan hasil informasi yang bersifat handal, bersifat akurat, adanya ketepatan pada waktu, serta mampu untuk dipertanggungjawabkan (Lestari, 2014). Selaras dengan kondisi tersebut, akuntabilitas publik ialah tanggungjawab dari Pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan pada sumber daya, melakukan pelaporan, dan melakukan pengungkapan pada seluruh kegiatan

yang berhubungan dengan penggunaan sumber daya publik kepada yang memberikan mandat.

Akuntabilitas dalam Pemerintah desa yang telah dikemukakan oleh (Sumpeno; 2011:222) menyebutkan adanya keterlibatan kekuatan dari Pemerintah desa guna melakukan pertanggungjawaban pada perolehan hasil aktivitas dari aktivitas dalam mengelola dana desa yang dilalukan dan ada hubungan yang erat pada persoalan pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud ialah hambatan yang terjadi pada finansial yang mampu ditelusuri pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) sekaligus elemen di dalamnya.

Hubungan antara masyarakat sebagai pemilik sumber daya dengan Pemerintah desa bisa digambarkan dengan teori agensi Jensen dan Meckling (1976), mendefinisikan teori agensi sebagai berikut "agency relationship as a contract under which one or more person (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent." Maknanya jalinan keagenan ialah suatu kontrak dimana satu atau lebih individu (principal) memberikan perintah pada individu (agent) guna melaksanakan suatu jasa atas nama principal serta terjadinya pemberian wewenang kepada agent menciptakan keputusan yang paling baik bagi principal. Dalam keagenan tersebut masyarakat pemilik sumber daya bertindak sebagai principal memberikan amanah dalam bentuk dana desa kepada Pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan di lingkup desa. Selanjutnya Pemerintah desa yang bertindak sebagai agent / penerima amanah memiliki kewajiban untuk mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel. Transparan yang dimaksud adalah keterbukaan Pemerintah terhadap pihak eksternal terkait informasi pengelolaan dana desa dan akuntabel yang dimaksud ialah tanggungjawab guna melakukan pemberian pertanggungjawaban kepada pihak yang

mempunyai wewenang atau berkewenangan guna memohon agar diberikan penjelasan (Halim dan Iqbal,2012).

Untuk mendukung akuntabilitas dana desa yang dikelola oleh Pemerintah desa, Pemerintah pusat selaku principal melalui Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan telah merilis sistem informasi akuntansi berbasis aplikasi dengan nama SISKEUDES (Sistem Informasi Keuangan Desa). Tujuan dari diciptakannya SISKEUDES ialah guna memberikan bantuan dalam meningkatkan akuntabilitas Pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Kesuksesan SISKEUDES dari sisi Information Quality dan Service Quality telah mampu mendukung kepuasan penggunaanya dalam membuat laporan keuangan (Pratamadan Amalia, 2019). Penerapan sistem teknologi informasi tanpa dipungkiri lagi semakin mempermudah kegiatan kita sehari-hari. Seperti halnya perolehan hasil riset dari Nugraha dan Astuti (2013) yang memberikan bukti bahwa dengan adanya pengaplikasian Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah telah mempermudah kegiatan mengenai pelaporan dengan sangat baik sehingga telah mencapai tingkat akuntabilitas yang maksimal di Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk.

Akuntabilitas Keuangan Desa Di Desa Jennetallasa seusai pengaplikasian aplikasi SISKEUDES amat memberikan terjadinya perubahan yang semakin baik diantaranya memberikan kemudahan dalam tahapan melaporkan pertanggungjawaban dan menyajikan perolehan hasil pada pertumbuhan secara meningkat pada mutu desa yang semakin baik, hasil laporan keuangan yang diberikan telah selaras dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, dan dalam pengaplikasian aplikasi SISKEUDES mampu menciptakan hasil laporan keuangan yang bersifat akuntabel (Juardi, dkk. 2018). Pernyataan demikian dimotivasi oleh riset Harafonna dan Indriani (2019), mengemukakan bahwa sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas. Semakin mudah suatu sistem dipantau dan diawasi maka akuntabilitasnya semakin meningkat.

Sistem keuangan menyediakan kenyamanan dalam melakukan administrasi dan mencegah potensi penyimpangan dari aturan yang berlaku (Triyono, dkk, 2019).

Berlandaskan pada data yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dana desa yang penyalurannya dilakukan oleh Pemerintah pusat dari tahun 2015 hingga pada tahun 2019 yang tiap-tiap tahunnya menyajikan data yang telah mengalami pertumbuhan secara meningkat. Pemerintah melakukan penyaluran dana desa pada tahun 2015 senilai Rp. 20,7 triliun, selanjutnya pada tahun 2016 Pemerintah melakukan penyaluran dana desa menjadi sebesar Rp 47 triliun, disusul pada tahun 2017 penyaluran dana desa menjadi senilai Rp 50 triliun, kemudian Pemerintah melakukan penyaluran dana desa kembali tahun 2018 yang terlihat naik menjadi senilai Rp 60 triliun, dan tahun 2019 ini penyaluran dana desa naik menjadi senilai Rp 70 triliun. Dalam kondisi ini Pemerintah melakukan penyaluran dana desa di Propinsi Bali yang memperlihatkan trend kenaikan. Propinsi Bali menerima penyaluran dana desa pada tahun 2015 dengan angka senilai Rp 185.428.984.000,00, disusul pada tahun 2016 dengan angka senilai Rp 416.264.690.000,00, sementara pada tahun 2017 dengan angka senilai Rp 537.258.505.000,00, disusul kemudian pada tahun 2018 dengan angka senilai Rp 531.144.963.000,00 dan untuk tahun 2019 dengan angka senilai Rp 630.189.586.000,00. Pusat peneliti menentukan pilihan pada Propinsi Bali disebabkan karean Pulau Dewata ialah Propinsi menunjukkan wisatanya melakukan kunjungan paling tinggi di Indonesia, sehingga kondisi ini mampu memberikan hasil devisa yang paling tinggi pula.

Berdasarkan data yang diperoleh Dana desa terbesar berdasarkan data 5 tahun terakhir di Propinsi Bali diterima oleh Kabupaten Buleleng dengan total transfer Rp 456.203.498.000,-. Penerimaan dana desa yang begitu besar tentu akan memiliki resiko yang besar juga karena akan mengakibatkan konflik kepentingan banyak pihak. Ruru, dkk

(2017) menyatakan semakin penerimaan dana tersebut terlihat banyak, maka pertanggungjawaban serta resiko yang ada dalam melakukan pengelolaan dana tersebut menjadi tinggi pula. Oleh karena itu dengan adanya SISKEUDES sangat diharapkan mampu untuk mengurangi konflik kepentingan sehingga akan memperkecil resiko dan terjadinya peningkatan pada akuntabilitas dalam melakukan pengelolaan dana desa. Perolehan hasil riset oleh Harafonna dan Indriani (2019) menunjukkan bahwa sistem informasi pada keuangan desa memberikan kontribusi secara positif terhadap akuntabilitas, kondisi ini disebabkan oleh kinerja sistem aplikasi dalam mengelola data keuangan desa semakin baik dan cepat dalam mengelolanya, sehingga dapat mengurangi dampak kecurangan dan salah saji dalam pengelolaan keuangan desa. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil penelitian dari Juardi, dkk (2018) dan Puspita, dkk (2019).

Namun di akhir tahun 2019, Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng masih saja menerima laporan pengaduan terkait dengan pengelolaan dana desa yang dilakukan melalui pemeriksaan khusus. Adapun salah satu laporan kasus yang sudah masuk ke Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng bahkan sudah masuk ke ranah kepolisian pada akhir tahun 2019 yaitu terkait dengan kasus pembuatan kawasan wisata selfie di Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng (Balieditor.com, frs; 2019). Kasus lainnya yaitu ditangkapnya Kepala Desa Celukan Bawang setelah pelantikan terkait dengan kasus korupsi pembangunan Kantor Celukan Bawang (Nusa Bali, nv ; 2019). Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan di buatnya SISKEUDES itu sendiri. Aplikasi SISKEUDES yang dibuat untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa karena semua kegiatan belanja yang dilakukan oleh desa harus terekam dalam sistem, pada kenyataannya masih bisa dilakukan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Atas adanya kasus-kasus tersebut maka adanya ketidaksesuaian antara teori dan praktik. Secara teori seharusnya dengan adanya sistem teknologi informasi

dalam hal ini SISKEUDES maka tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh aparat desa namun pada kenyataannya masih saja terjadi penyimpangan yang mengurangi akuntabilitas itu sendiri. Sehingga penting untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesuksesan penerapan SISKEUDES terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hal prinsip paling penting melekat pada Pemerintah desa yang memiliki jalinan dalam mengelola dana desa ialah sistem pengendalian internal. Hal ini agar kegiatan dalam pemerintahan mulai dari perencanaan, implementasi, pengawasan, dan tanggung jawab harus dilakukan secara tertib, terkontrol, efisien dan efektif. Sistem pengendalian internal yang berada di Pemerintahan ialah dorongan yang bersifat esensial, sebab tersedianya sistem pengendalian yang tepat akan mampu memberikan dampak pada Pemerintah desa di dalam menentukan pemilihan keputusan secara internal dan mampu menyebabkan timbulnya implikasi yang berdampak baik pada Pemerintah desa dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi (Triyono, dkk, 2019).

Kepercayaan yang menunjukkan sudah memadai dalam mengelola dana desa selaras dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan yang akhirnya akan mampu dalam pemenuhan kriteria akuntabilitas merupakan dampak dari keberadaan Sistem Pengendalian Internal yang diaplikasikan. Pemerintah Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memberikan pernyataan bahwa SPIP mempunyai partisipasi keterlibatan yang esensial dalam mengawal akuntabilitas sebagai bukti dalam pengelolaan keuangan baik dari sudut pandang assurance ataupun dari sudut pandang konsultasi. Selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang memberikan pernyataan bahwa aparat yang bertugas mengawasi Pemerintah secara internal yang dalam situasi ini Inspektorat melakukan bentuk pengawasan secara intern atas pengimplementasian kewajiban dan fungsi instansi Pemerintah yang mencakup akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan pengimplementasian

SPIP. Penerapan SPIP di lingkup Pemerintah desa tak kalah pentingnya saat ini dengan penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah daerah.

Hal tersebut dikarenakan desa saat ini dituntut profesional dalam mengatur atau mengolah dana desa yang telah disalurkan oleh Pemerintah pusat. Oleh sebab itu semakin baik penerapan SPIP suatu Pemerintah maka akan meningkatkan akuntabilitas dari laporan keuangan yang dihasilkan (Azizah, 2015). Perolehan pada hasil-hasil riset sebelumnya yang telah diteliti oleh Yudianto dan Sugiarti (2017) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) memberikan kontribusi yang bersifat positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun hasil penelitian yang berbeda diperoleh Santoso (2016) yang dalam risetnya telah memberikan bukti bahwa SPIP tanpa menunjukkan dampak secara signifikan pada akuntabilitas yang terdapat pada keuangan daerah. Perolehan hasil tersebut didukung lagi dengan perolehan hasil riset dari Sardi, dkk (2016) yang juga memberikan pernyataan bahwa sistem pengendalian internal yang berada di Pemerintah tanpa memperlihatkan dampak secara signifikan pada akuntabilitas kinerja instansi yang berada di Pemerintah. Sehingga dalam hal ini terjadi ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya terkait dengan pengaruh SPIP terhadap akuntabilitas.

Berlandaskan pada pemaparan yang telah disajikan, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul "Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Desa dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa".

Dengan adanya SISKEUDES seperti halnya penerapan SIMDA keuangan telah mempermudah kegiatan mengenai pelaporan dengan sangat baik sehingga telah mencapai tingkat akuntabilitas yang maksimal (Nugraha, 2013). Penelitian Harafonna dan Indriani (2019) menyatakan bahwa sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa dengan penggunaan sistem teknologi informasi maka semua kegiatan sudah ada rekaman transaksinya sehingga

sangat sulit untuk seseorang melakukan manipulasi dalam pengelolaan dana desa. Penggunaan sistem keuangan menyediakan kenyamanan dalam melakukan administrasi dan mencegah potensi penyimpangan dari aturan yang berlaku (Triyono, dkk, 2019). Kenyamanan yang dimaksudkan yaitu terkait dengan Information Quality dan Service Quality (Pratama, 2019).

Dalam teori stakeholder Pemerintah desa harus menjaga hubungan baik dengan para stakeholdernya, sehingga stakeholder akan memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahannya. Penggunaan SISKEUDES dapat membantu meningkatkan kepercayaan stakeholder karena semua kegiatan terekam dalam sistem. Namun perlu disadari bahwa teori agensi menjelaskan mengenai benturan kepentingan antara agen dan principal akan selalu terjadi. Teori tersebut membuktikan bahwa benturan kepentingan antara pemerintah desa (agen) dengan masyarakat (principal) tidak bisa diatasi semua oleh adanya SISKEUDES.

Contoh kasus yang sudah masuk ke Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng bahkan sudah masuk ke ranah kepolisian saat ini yaitu terkait dengan kasus pembuatan kawasan wisata selfie di Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng (Balieditor.com, frs; 2019). Kasus lainnya yaitu ditangkapnya Kepala Desa Celukan Bawang setelah pelantikan terkait dengan kasus korupsi pembangunan Kantor Celukan Bawang (Nusa Bali, nv ; 2019). Hal tersebut membuat kepercayaan para stakeholder menjadi menurun terhadap kinerja organisasi.

Berdasarkan kajian teori, hasil penelitian terdahulu dan contoh kasus maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H1: Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa.

Berlandaskan atas pernyataan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan bahwa SPIP mempunyai partisipasi yang bersifat esensial dalam mengawal

akuntabilitas pada pengelolaan keuangan desa baik dari sudut pandang assurance ataupun dari sudut pandang konsultasi. Hal ini selaras dengan mandat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang memberikan pernyataan bahwa aparat yang bertugas mengawasi secara intern Pemerintah. Kemudian di dalam melakukan pengawasan secara intern atas pengimplementasian tanggungjawab dan fungsi instansi Pemerintah akan melibatkan akuntabilitas pada keuangan negara dan pembinaan dari pengimplementasian SPIP. Semakin baik penerapan SPIP suatu Pemerintah maka akan meningkatkan akuntabilitas dari laporan keuangan yang dihasilkan (Azizah, 2015).

Konsep agensi yang perkembangannya dilakukan oleh Jensen dan Meckling (1976) memberikan pernyataan bahwa pertentangan agensi timbul akibat adanya Information Asymetry. Berhubungan dengan riset ini ialah wewenang yang terjadi secara penuh dalam mengatur dana desa yang dimiliki oleh Pemerintah desa menciptakan peluang terjadinya Information Asymetry yang timbul antara Pemerintah desa dan masyarakat. Konsep Jensen dan Meckling ini didukung oleh teori agensi yang dikembangkan oleh Eisenhardt, memberikan pernyataan bahwa konsep agensi yang perkembangannya didasarkan pada anggapan-anggapan salah satunya ialah anggapan terkait karakter manusia, menimbulkan terjadinya penekanan bahwa seseorang secara global melekatkan karakter dalam dirinya yang bersifat mementingkan diri sendiri (self interest), rasionalitas terlihat adanya keterbatasan (bounded rationality), dan risiko tanpa disengaja (risk adverse). Self interest dan keterbatasan rasional yang sangat tinggi mengakibatkan seseorang untuk bertindak di luar norma-norma kelembagaan yang berlaku untuk memenuhi keinginannya. Sehingga dalam hal ini menciptakan peluang untuk terjadinya penyimpangan oleh aparat desa saat mengelola dana desa yang diberikan oleh Pemerintah pusat.

Oleh sebab itu pengaplikasian SPIP belum diaplikasikan secara memadai sehingga tanpa mampu menumbuhkan

peningkatan pada akuntabilitas. Kondisi ini diberikan bukti dengan ketidaktepatan hasil riset terdahulu. Riset yang dilakukan oleh Yudianto dan Sugiarti (2017), Aziiz dan Prastiti (2019), Widyatama, dkk (2017), dan Martini, dkk (2019) memberikan pernyataan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) memberikan dampak secara signifikan pada akuntabilitas dalam mengelola dana desa. Sebaliknya hal ini berlawanan dengan riset dari Santoso (2016), bahwa antara SPIP dengan akuntabilitas keuangan daerah tanpa memberikan bukti terjadinya dampak secara signifikan. Perolehan hasil-hasil riset tersebut selaras dengan hasil riset dari Sardi, dkk (2016) yang memberikan pernyataan bahwa sistem pengendalian internal yang terdapat pada Pemerintah tidak menunjukkan dampak secara signifikan pada akuntabilitas kinerja dalam instansi Pemerintah.

Berladaskan paparan yang telah disajikan, maka dugaan sementara atau disebut hipotesis akan dihasilkan ialah :

H2: Sistem pengendalian internal Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berladaskan pada latar belakang dan identifikasi yang ada pada masalah, maka perumusan masalah dalam riset ini ialah : (1) Bagaimanakah pengaruh penerapan sistem informasi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ? (2) Bagaimana pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

Berladaskan pada rumusan yang ada pada masalah yang telah disajikan sebelumnya, adapun tujuan dari riset ini ialah : (1) Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem informasi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. (2) Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Metode

Peneliti menjatuhkan pilihan dalam riset ini mempergunakan pendekatan yang bersifat kuantitatif. Adapun akar data yang peneliti tentukan dalam riset ini ialah data

yang bersumber dari tanggapan jawaban-jawaban dalam daftar pernyataan atau kuesioner. Populasi dalam riset ini ialah keseluruhan sekretaris dan bendahara pemerintahan desa se- Kab. Buleleng yang berjumlah 258 orang. Untuk menentukan berapa kuantitas sampel pada riset ini yang pantas dipergunakan maka peneliti memilih teknik Slovin. Adapun desa yang dipilih menjadi sampel dan ditentukan dengan metode random sampling. Di Kab. Buleleng total desa yang ada yaitu 129 desa, sehingga berdasarkan rumus tersebut maka diperoleh sampel sebanyak 56 desa. Dari 56 desa jumlah responden ditentukan sebanyak 112 responden, dimana masing-masing desa diwakili oleh 2 responden yaitu sekretaris desa dan bendahara desa.

Teknik pengumpulan data dalam riset ini menggunakan daftar pernyataan atau kuesioner. Kuesioner yang tersedia di riset ini diparameter mempergunakan ukuran Likert yang memiliki dimensi 5, dengan rentang nilai 1 sampai 5. Kuesioner tersebut disebarikan secara online menggunakan google form. Cara penganalisisan data dalam riset ini didahului dengan melakukan pengujian kualitas data ialah dengan melakukan pengujian secara validitas dan melakukan pengujian secara reabilitas. Selanjutnya dilakukan uji statistik deskriptif. Kemudian selanjutnya dilakukan pengujian asumsi klasik yang mencakup pengujian secara normalitas, pengujian secara multikolinearitas, dan pengujian secara heteroskedastisitas. Kemudian dilakukan pengujian hipotesis dengan melakukan pengujian secara regresi linear berganda dan pengujian secara koefisien determinasi, pengujian secara simultan (uji F), dan pengujian secara regresi secara individu (uji t).

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil Mulanya dikerjakan pengujian pada kualitas data dengan mengimplementasikan pengujian secara validitas dan pengujian secara reliabilitas. Perolehan pada pengujian secara validitas memberikan bukti bahwa keseluruhan variabel memperlihatkan hasil pada nilai koefisien korelasi dengan nilai

pada keseluruhan item pernyataan-pernyataan nilainya lebih besar dari angka 0,30. Kondisi ini memperlihatkan bahwa butiran-butiran pernyataan dalam elemen riset tersebut menunjukkan kevaliditasnya. Kemudian perolehan pada hasil pengujian secara reliabilitas memberikan bukti bahwa keseluruhan elemen riset menunjukkan hasil pada koefisien Cronbach's Alpha lebih dari angka 0,60. Kondisi ini memberikan bukti bahwa keseluruhan elemen sudah reliabel sehingga mampu difungsikan dalam melakukan riset.

Kemudian berladaskan pada perolehan hasil pengujian secara statistik deskriptif dengan tersedianya total sampel dengan kuantitas 112 orang pegawai, maka memperlihatkan bahwa keseluruhan hasil pada standar deviasi menerima hasil nilai yang lebih kecil jika dilakukan perbandingan dengan perolehan hasil nilai rerata, yang bermakna bahwa penyebaran jawaban-jawaban dari responden yang erat kaitannya dengan pengaplikasian sistem informasi pada keuangan sudah merata dan berada dalam keadaan yang selaras dengan kriteria baik.

Kemudian selanjutnya dikerjakan pengujian secara asumsi klasik yang mencakup dari pengujian secara normalitas, pengujian secara multikolinearitas, dan pengujian secara heteroskedastisitas. Perolehan hasil pengujian secara normalitas memberikan hasil yang nilai pada signifikansi memperoleh angka 0,545 yang tentu angka ini lebih besar dari angka 0,05. Oleh sebab itu perolehan hasil pada nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov yang angkanya lebih dari angka 0,05, maka mampu disajikan suatu kesimpulan bahwa jenis persamaan regresi tersebut mampu teralokasi secara normal. Perolehan hasil pengujian secara multikolinearitas memberikan bukti perolehan nilai tolerance dan perolehan nilai VIF dari keseluruhan variable tersebut memberikan pembuktian bahwa nilai pada tolerance untuk tiap-tiap variabel lebih besar dari angka 10% dan nilai VIF lebih kecil dari angka 10 yang bermakna jenis persamaan regresi bebas dari gejala-gelaja yang bersifat multikolinearitas. Kemudian

perolehan hasil pengujian secara heterokedastisitas memberikan bukti pada perolehan nilai signifikansi dari variabel penerapan sistem informasi keuangan dengan mendapatkan hasil dengan angka 0,864, dan pengendalian internal mendapatkan hasil dengan angka 0,837. Nilai tersebut tentu terlihat memperlihatkan lebih besar dari angka 0,05 yang bermakna tidak muncul dampak antara variabel yang bersifat bebas terhadap absolute residual. Dengan begitu, jenis yang diciptakan tanpa adanya kandungan gejala-gejala yang bersifat heteroskedastisitas.

Setelah pengujian secara kualitas data, pengujian secara statistik deskriptif dan pengujian secara asumsi klasik telah mampu untuk dipenuhi, pengujian selanjutnya yang dikerjakan ialah pengujian hipotesis dengan mengaplikasikan pengujian secara regresi linear berganda dan pengujian secara koefisien determinasi, pengujian secara simultan (uji F), dan pengujian secara regresi secara individu (uji t). Berikut ialah ringkasan dari hasil pengujian secara regresi linear berganda yang mampu dicermati pada tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
(Constant)	3,182	2,147		1,482	0,141
Penerapan sistem informasi keuangan (X1)	0,776	0,074	0,675	10,537	0,000
Pengendalian internal (X2)	0,311	0,068	0,291	4,547	0,000

Berlandaskan pada perolehan hasil analisis regresi linier berganda yang dapat dicermati pada Tabel 1, maka mampu diciptakan persamaan regresi ialah :

$$Y = 3,182 + 0,776 X1 + 0,311 X2$$

Berlandaskan pada hasil dari persamaan regresi di atas, mampu untuk diberikan keterangan ialah : nilai konstan sebesar 3,182, artinya apabila penerapan sistem informasi keuangan dan pengendalian internal tetap atau tidak ada pengurangan maupun penambahan, maka akuntabilitas dana desa akan tetap sebesar 3,182 persen. Nilai konstan ini memiliki makna bahwa ketika tidak ada persepsi sama sekali terhadap penerapan sistem informasi keuangan desa dan pengendalian internal maka masih ada penilaian positif terhadap persepsi akuntabilitas dana desa.

Koefisien regresi (b1) pada variabel penerapan sistem informasi keuangan desa sebesar 0,776 menunjukkan nilai yang positif artinya apabila penerapan sistem informasi keuangan (X1) meningkat dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka nilai dari akuntabilitas dana desa akan mengalami peningkatan sebesar 0,776 atau sebesar 77,6 persen. Variabel

penerapan sistem informasi keuangan desa memiliki koefisien yang bernilai positif ini berarti bahwa antara persepsi terhadap penerapan sistem informasi keuangan desa dan persepsi akuntabilitas dana desa memiliki perbandingan lurus. Dengan demikian ketika ada peningkatan persepsi terhadap penerapan sistem informasi keuangan desa maka akan berpengaruh terhadap peningkatan persepsi akuntabilitas dana desa. Begitu juga sebaliknya jika terjadi penurunan persepsi terhadap penerapan sistem informasi keuangan desa maka akan berpengaruh terhadap penurunan persepsi akuntabilitas dana desa.

Koefisien regresi (b2) pada variabel pengendalian internal sebesar 0,311 memberikan bukti yang terlihat positif bermakna apabila pengendalian internal (X2) terjadi peningkatan dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka nilai akuntabilitas dana desa akan mengalami peningkatan sebesar 0,311 atau sebesar 31,1 persen. Variabel pengendalian internal memiliki koefisien yang bernilai positif ini berarti bahwa antara persepsi terhadap pengendalian internal dan persepsi akuntabilitas dana desa memiliki

perbandingan lurus. Dengan demikian ketika ada peningkatan persepsi terhadap pengendalian internal maka akan berpengaruh terhadap peningkatan persepsi akuntabilitas dana desa. Begitu juga sebaliknya jika terjadi penurunan persepsi terhadap pengendalian internal maka akan berpengaruh terhadap penurunan persepsi akuntabilitas dana desa.

Selanjutnya dikerjakan pengujian secara koefisien determinasi yang difungsikan guna melakukan pengukuran dalam mencari tahu seberapa jauh kekuatan model dalam memberikan keterangan jenis variabel yang bersifat terikat. Perolehan pada hasil pengujian secara koefisien determinasi mampu dicermati pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,936 ^a	0,876	0,874	2,67076

Perolehan hasil uji yang mampu dicermati pada Tabel 2 memberikan pemahaman bahwa diterimanya hasil besarnya adjusted R2 (koefisien determinasi yang telah diselaraskan) ialah dengan angka mencapai 0,874. Ini bermakna jenis akuntabilitas dana desa mampu mendapatkan dampak yang bersifat secara signifikan oleh variabel penerapan sistem informasi keuangan, dan pengendalian internal dengan angka mencapai 87,4 persen, sementara hasil :

sisanya memperlihatkan angka 12,6 persen yang mampu untuk diberikan keterangan oleh dorongan-dorongan lain yang tidak mampu untuk diberikan keterangan dalam model riset ini.

Pengujian selanjutnya yang dikerjakan ialah pengujian secara simultan (uji F). Berladaskan pada perolehan hasil pengujian simultan (uji F) yang telah diaplikasikan, maka mampu dipetik suatu kesimpulan ialah

Tabel 3. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	5499,287	2	2749,644	385,486	0,000 ^a
Residual	777,490	109	7,133		
Total	6276,777	111			

Perolehan pada hasil pengujian secara F (Ftest) memberikan bukti bahwa nilai signifikansi P value menyajikan angka 0,000 yang tentu angka tersebut lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, ini bermakna model yang diaplikasikan dalam riset ini terlihat menunjukkan kelayakan. Perolehan hasil ini memberikan makna bahwa keseluruhan variabel yang bersifat independen mampu melakukan perkiraan atau memberikan penjelasan pada fenomena akuntabilitas dana desa. Dengan makna lain ada dampak secara simultan dari variabel penerapan sistem informasi keuangan, dan pengendalian internal pada akuntabilitas dana desa. Hal ini bermakna model mampu difungsikan

guna melakukan penganalisisan secara berkelanjutan atau dengan makna lain model mampu difungsikan guna melakukan proyeksi sebab hasil goodness of fitnya terlihat baik dengan perolehan hasil pada nilai signifikansi P value 0,000.

Pengujian selanjutnya yang dilakukan ialah pengujian secara regresi secara individu (uji t). Berlandaskan pada perolehan hasil pengujian regresi secara individu (uji t) yang telah diaplikasikan, maka mampu dipetik suatu kesimpulan ialah :

Berlandaskan pada perolehan hasil penganalisisan dampak dari penerapan sistem informasi keuangan terhadap akuntabilitas dana desa didapatkan nilai

signifikansi dengan angka 0,000 dan dengan perolehan hasil pada nilai koefisien regresi positif dengan angka 0,776 dan t hitung memperlihatkan angka 10,537. Perolehan hasil pada nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga hal ini memberikan indikasi bahwa H_1 telah terjadi penerimaan dan H_0 telah terjadi penolakan. Perolehan hasil ini memiliki makna bahwa penerapan sistem informasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dana desa, maka hipotesis pertama telah terjadi penerimaan.

Berlandaskan pada perolehan hasil penganalisisan dampak dari internal terhadap akuntabilitas dana desa didapatkan nilai signifikansi dengan angka 0,000 dan dengan perolehan hasil pada nilai koefisien regresi positif dengan angka 0,311 dan t hitung memperlihatkan angka 4,547 Perolehan hasil pada nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga hal ini memberikan indikasi bahwa bahwa H_2 telah terjadi penerimaan dan H_0 telah terjadi penolakan. Perolehan hasil ini memiliki makna bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dana desa, maka hipotesis kedua telah terjadi penerimaan.

Pengaruh Penerapan sistem informasi keuangan Terhadap Akuntabilitas dana desa

Perolehan pada hasil penganalisisan memperlihatkan bahwa penerapan sistem informasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dana desa. Hal ini memiliki makna bahwa semakin baik penerapan sistem informasi keuangan pada Kabupaten Buleleng, maka akan semakin tinggi pula akuntabilitas dana desa yang dihasilkan oleh aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Buleleng. Begitu pula sebaliknya, semakin buruk penerapan sistem informasi keuangan pada Kab. Buleleng maka akuntabilitas dana desa yang dihasilkan oleh aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Buleleng akan menjadi makin kurang.

Perolehan pada hasil tersebut mampu memberikan indikasi bahwa kaidah-kaidah yang terlibat dalam pengaplikasian sistem informasi keuangan mampu dipandang secara baik dan

memberikan akibat secara kenyataan pada akuntabilitas dana desa Kab. Buleleng. Penerapan sistem informasi keuangan yang diukur berlandaskan elemen: elemen bersifat relevan, elemen bersifat reliabel, elemen bersifat lengkap, elemen bersifat tepat waktu, elemen bersifat mudah dalam memahami, elemen bersifat mampu diverifikasi, elemen bersifat mampu dilakukan pengaksesan, elemen bersifat memberikan pemahaman pada individu, elemen bersifat prosedur, elemen pada data, elemen pada perangkat lunak, elemen pada infrastruktur teknologi, dan elemen pada pengendalian internal terbukti mampu meningkatkan akuntabilitas dana desa di Kab. Buleleng.

Perolehan pada hasil riset ini selaras dengan perolehan hasil riset dari Harafonna dan Indriani (2019) yang memberikan bukti bahwa sistem keuangan desa berdampak secara positif terhadap akuntabilitas. Perolehan pada hasil riset ini juga selaras dengan riset dari Triyono dkk, (2019) dan Pratama (2019) yang memberikan bukti ada dampak secara positif antara penerapan sisten informasi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan adanya SISKEUDES seperti halnya penerapan SIMDA keuangan telah mempermudah kegiatan mengenai pelaporan dengan sangat baik sehingga telah mencapai tingkat akuntabilitas yang maksimal (Nugraha, 2013).

Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa

Perolehan pada hasil penganalisisan memperlihatkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dana desa. Hal ini memiliki makna bahwa semakin baik pelaksanaan pengendalian internal pada aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Buleleng, maka akan semakin meningkatkan akuntabilitas dana desa tersebut. Berbanding terbalik, semakin tidak baik pelaksanaan pengendalian internal maka akuntabilitas dana desa pada Kabupaten Buleleng akan menjadi makin turun.

Perolehan pada hasil tersebut mampu memberikan indikasi bahwa kaidah-kaidah yang terlibat dalam

pengaplikasian pengendalian internal mampu dipandang secara baik dan memberikan akibat secara kenyataan pada akuntabilitas dana desa Kab. Buleleng. Pengendalian internal yang diukur berlandaskan elemen: elemen bersifat relevan, elemen bersifat reliabel, elemen bersifat lengkap, elemen bersifat tepat waktu, elemen bersifat mudah dalam memahami, elemen bersifat mampu diverifikasi, elemen bersifat mampu dilakukan pengaksesan, elemen bersifat memberikan pemahaman pada individu, elemen bersifat prosedur, elemen pada data, elemen pada perangkat lunak, elemen pada infrastruktur teknologi, dan elemen pada pengendalian internal terbukti mampu meningkatkan akuntabilitas dana desa di Kab. Buleleng.

Perolehan pada hasil riset ini selaras dengan perolehan hasil riset dari Yudianto dan Sugiarti (2017), Aziiz dan Prastiti (2019), Widyatama, dkk (2017), dan Martini, dkk (2019) yang memberikan bukti bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) memiliki dampak secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perolehan pada hasil riset ini juga selaras dengan perolehan hasil riset dari Azizah (2015) yang memberikan bukti bahwa terdapat dampak secara positif antara pengendalian internal terhadap akuntabilitas dana desa. Semakin baik penerapan SPIP suatu Pemerintah maka akan terjadinya peningkatan pada akuntabilitas dari perolehan hasil pada laporan keuangan.

4. Simpulan dan Saran

Berlandaskan pada perolehan pada hasil riset dan penyajian dari pembahasan telah disajikan sebelumnya, maka mampu dipetik kesimpulan ialah :

Pertama penerapan sistem informasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dana desa, sebab mendapatkan hasil pada nilai t hitung positif dengan angka 10,537. Kemudian dengan perolehan hasil pada nilai signifikansi $0,000 < 0,050$. Hal ini menyajikan makna bahwa semakin baik penerapan sistem informasi keuangan pada aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Buleleng, maka akan semakin

tinggi pula akuntabilitas dana desa tersebut. Kedua pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dana desa, sebab mendapatkan hasil pada nilai t hitung positif dengan angka 4,547. Kemudian dengan perolehan hasil pada nilai signifikansi $0,000 < 0,050$. Hal ini menyajikan makna bahwa semakin baik pelaksanaan pengendalian internal pada aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Buleleng, maka akan semakin meningkatkan akuntabilitas dana desa tersebut.

Daftar Pustaka

- Aziiz, Muhammad Nur dan Prastiti, Sawitri Dwi. 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Journal Auntansi Aktual*. Vol.6, No. 2.
- Azizah, Nur., Junaidi., dan Setiawan, Achdiar Redy. 2015. Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Riset dan Aplikasi : Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 1, No. 2. ISSN 2443-3381.
- Halim, Abdul., dan Iqbal, Muhammad. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah: Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi 3*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Harafonna, Cut Nadhifa dan Indriani, Mirna. 2019. Pengaruh Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Dengan Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Variabel Intervening. *JimekA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*. Vol. 4, No. 2.
- Jensen dan Meckling. 1976. *The Theory of The Firm : Manajerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership*

- Structure. *Journal of Financial and Economics*. 3:pp : 305-360.
- Martini, Rita., Lianto, Naufal., Hartati, Sukmini., Zulkifli, Zulkifli., Widyastuti, Endah. 2019. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*. Vol 2, No 1.
- Nugraha, Hermadhani Adi., dan Astuti, Yuli Widi. (2013). Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda Keuangan) Dalam Pengolahan Data Keuangan Pada Organisasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Akuntansi Aktual*, 2(1), 25–33.
- Pratama, Vicko., dan Amalia, Rahayu. 2019. Analisa Keseuksesan Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dengan Model Delone Dan Mclean (Stadi Kasus : Kabupaten Ogan Komering Ilir). *Bina Darma Conference on Computer Science*. Vol 1 No 6.
- Puspita, Dian eka, dkk. 2019. Evaluation Of Use Of Application SISKEUDES (Financial System Desa) Quality Improvement Efforts In Village Year 2018 Financial Accountability (A Case Study Of Rural Nogosari Rowokangkung Subdistrict Lumajang). *Progress Confrence*. Vol. 2 No.2, E-ISSN : 2622-304X, P-ISSN : 2622-3031.
- Ruru, Novianti., Kalangi, Lintje., dan Budiarto, Novi S.. 2017. Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*. Vol 12, No 01.
- Santoso, Eli Budi. 2016. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur). *Digital Repository Unila*. Tesis.
- Sardi, Santha Julia., Rifa'i, H. Ahmad, dan Husnan L. Hamdani. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Satker Balai Besar Bmkg Wilayah Iii Denpasar-Bali). *InFestasi : Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol 12, No 2.
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read.
- Triyono, Triyono., Achyani, Fatchan., dan Arfiansyah, Mufti Arief. 2019. The Determinant Accountability Of Village Funds Management (Study in the Villages in Wonogiri District). *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol.4, No. 2.
- Widyatama, Arif., Novita, Lola., dan Diarespati, Diarespati. 2017. Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol.2, No.2.
- Yudianto, Ivan dan Sugiarti, Ekasari. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol 17, No 1.